

Analisis Ekonomi Politik dalam Pembangunan Infrastruktur di Kepulauan Riau: Kajian Literatur terhadap Proyek Jembatan Batam-Bintan

Juliana Eka Pratiwi *¹
Tiara Ayu Puspita Sari ²
Nur Nadirah ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

*e-mail : julianaeprtw@gmail.com

Abstrak

Pembangunan Jembatan Batam-Bintan merupakan langkah strategis yang merefleksikan dinamika kompleks antara kepentingan ekonomi dan politik dalam pengelolaan infrastruktur di wilayah kepulauan. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menelaah bagaimana interaksi antara berbagai aktor—pemerintah pusat dan daerah, investor, serta masyarakat—mempengaruhi narasi, perencanaan, dan pelaksanaan proyek. Kajian menunjukkan bahwa proyek ini tidak sekadar berfungsi sebagai penghubung fisik, melainkan juga sebagai arena tarik ulur kepentingan dan pergeseran sosial. Selain potensi ekonominya, proyek ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, ketimpangan distribusi manfaat, serta transformasi sosial-budaya masyarakat lokal. Diperlukan tata kelola yang partisipatif dan sensitif terhadap konteks lokal agar pembangunan ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: konomi politik, pembangunan infrastruktur, Jembatan Batam-Bintan, kebijakan publik, Kepulauan Riau.

Abstract

The construction of the Batam-Bintan Bridge stands as a strategic initiative reflecting the intricate interplay of political and economic interests in managing infrastructure within an archipelagic region. Through a literature review approach, this study examines how interactions among key stakeholders—including national and local governments, private investors, and local communities—shape the discourse, planning, and execution of the project. The findings reveal that the bridge serves not merely as a physical link but as a contested space of interests and socio-political shifts. While it holds economic promise, concerns arise regarding environmental impact, unequal distribution of benefits, and sociocultural changes among local populations. Inclusive and context-aware governance is essential to ensure that the project progresses in a sustainable and equitable manner for all stakeholders.

Keywords: Political economy, infrastructure development, Batam-Bintan Bridge, public policy, Riau Island

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional khususnya Selat Malaka yang menjadikannya sebagai kawasan vital dalam perekonomian nasional (Humas BP Batam, 2019). Namun, sebagai wilayah kepulauan kepri menghadapi tantangan besar dalam hal konektivitas antar pulau yang berdampak pada distribusi barang dan mobilitas penduduk. Pemerintah daerah telah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama untuk mengatasi hambatan geografis ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pembangunan jalan dan jembatan yang bernilai ekonomis terus dilakukan untuk membuka isolasi wilayah terpencil dan meningkatkan aksesibilitas antar pulau (Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2018).

Salah satu proyek infrastruktur yang menjadi fokus utama adalah pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin) (Kepri Antara News, 2025). Proyek ini dirancang untuk menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan yang merupakan dua pusat ekonomi utama di Kepri (SIMPUL KPBU, 2024). Dengan panjang 14.76 km jembatan ini diharapkan dapat mempercepat arus barang

dan jasa serta meningkatkan efisiensi logistik di kawasan tersebut (Kantor Staf President, 2021). Proyek ini juga masuk dalam daftar proyek Strategis Nasional (PSN) yang menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah (Kepri Antara News, 2025).

Pembangunan Jembatan Batam-Bintan memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Dengan terhubungnya dua pulau utama, diharapkan akan terjadi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor pariwisata. Selain itu, proyek ini juga dapat memperkuat posisi Kepri sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang menjadi bagian dari rencana induk pengembangan kawasan Batam, Bintan dan Karimun (SIMPUL KPBU, 2024).

Namun, proyek ini tidak terlepas dari dinamika ekonomi politik yang kompleks. Proses perencanaan dan implementasi proyek infrastruktur besar seperti jembatan Batam-Bintan sering kali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini mencakup alokasi anggaran, pembebasan lahan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Analisis ekonomi politik diperlukan untuk memahami bagaimana kekuasaan dan kepentingan berbagai aktor memengaruhi jalannya proyek ini (MARIS, 2022).

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis dinamika ekonomi politik dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan dengan fokus pada bagaimana interaksi antara aktor-aktor politik dan ekonomi mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan proyek. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam proses pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan seperti Kepri. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung keberhasilan proyek dan pembangunan regional secara keseluruhan.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literature sebagai metode utama untuk memahami dinamika ekonomi politik dalam pembangunan infrastruktur khususnya Proyek Jembatan Batam-Bintan. Pendekatan ini dipilih karena bersifat eksploratif dan memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif, narasi serta dinamika aktif yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar. Kajian literature juga memberikan ruang untuk menelaah teori, kebijakan dan praktik yang telah diterapkan dalam konteks serupa di wilayah lain yang relevan untuk di analisis dalam kasus Kepulauan Riau.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini meliputi jurnal akademik yang berfokus pada isu pembangunan kebijakan publik dan ekonomi politik. Dan penelitian ini juga menggunakan laporan resmi pemerintah seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), peraturan presiden terkait proyek strategis nasional dan laporan dari Kementerian PUPR serta Bappenas sebagai data pendukung. Berita media daring dari portal nasional maupun lokal yang melaporkan perkembangan proyek Jembatan Batam-Bintan serta dokumen perencanaan proyek seperti Feasibility study, analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan presentasi publik dari badan perencanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Jembatan Batam-Bintan diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau dengan fokus pada kemudahan akses transportasi, penguatan sektor industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kepri Antara News, 2025). Proyek ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi biaya logistik antara Pulau Batam dan Pulau Bintan serta mengoptimalkan mobilitas kendaraan dari kedua wilayah di Kepulauan Riau tersebut (Newsletter Kantor bersama KPBU, 2022).

Studi oleh Chalil menunjukkan bahwa dalam skenario pembangunan jembatan terdapat 3 efek utama yaitu *multiplier effect*, *spin off effect* dan *spill over effect*. Efek-efek ini memberikan dampak positif pada Kota Batam dari Kabupaten Bintan dengan laju pertumbuhan Kabupaten Bintan meningkat 2-3 kali lipat dibandingkan tanpa pembangunan jembatan (Chalil, 2013).

Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Jembatan Batam-Bintan melibatkan berbagai aktor termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Kepri Antara News, 2021). Namun, proyek ini menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga dan penyelarasan regulasi terutama terkait kasus Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Batam, Bintan dan Karimun (Kepri Antara News, 2025)

Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai ketimpangan distribusi manfaat proyek, Pihak-pihak tertentu mungkin memperoleh keuntungan lebih besar sementara masyarakat lokal khawatir akan dampak negatif seperti peningkatan harga lahan dan gentrifikasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap proyek.

Pembangunan jembatan sepanjang 7,5 km ini menghadapi tantangan teknis signifikan termasuk kondisi perairan yang dalam dan bergelombang tinggi. Selain itu, proyek ini harus mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem laut dan masyarakat sekitar (kompasiana, 2023). Studi kelayakan dan survei penyelidikan tanah telah dilakukan untuk memastikan fondasi embatan aman dan optimal (Candra Gunawan, 2024).

Aspek lingkungan ini juga menjadi perhatian utama. Pembangunan jembatan harus memperhatikan dampak terhadap ekosistem laut dan masyarakat sekitar serta memastikan bahwa proyek ini tidak termasuk merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.

Dengan adanya jembatan ini diharapkan redistribusi penduduk dari Batam ke Bintan mengingat biaya hidup di Bintan lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi kepadatan penduduk di Batam dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bintan (Pandu Wiyoga, 2023). Namun, perubahan ini juga memerlukan perencanaan tata ruang yang matang untuk menghindari urbanisasi yang tidak terkendali

Selain itu, peningkatan mobilitas penduduk dapat membawa dampak sosial seperti perubahan struktur sosial dan budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian sosial untuk memahami dampak jangka panjang dari proyek ini terhadap masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Pembangunan Jembatan Batam-Bintan merupakan proyek strategis yang tidak hanya berdampak pada peningkatan konektivitas antar wilayah di Kepulauan Riau tetapi juga mencerminkan kompleksitas ekonomi politik dalam perencanaan infrastruktur nasional. Proyek ini berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi regional melalui efisiensi logistik dan redistribusi penduduk, namun disisi lain menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga, transparansi kebijakan serta dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Kajian literature menunjukkan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada tata kelola yang inklusif, partisipatif dan adaptif terhadap konteks lokal.

SARAN

Untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan Jembatan Batam-Bintan pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan khususnya dalam skema KPBU yang melibatkan sektor swasta. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan kajian sosial lingkungan secara komprehensif dan melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi proyek. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis bukti pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan dapat memberikan manfaat yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra Gunawan. (2024). *Penyelidikan Tanah Jembatan Batam-Bintan Dimulai, Konstruksi 2025*. Gokepri.Com.
- Chalil, T. M. (2013). Pemodelan Dampak Pembangunan Jembatan Batam-Bintan Terhadap Dinamika Kependudukan, Ekonomi, Dan Guna Lahan Batam dan Bintan. *Journal of Regional and City Planning*, 23(3), 241. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2012.23.3.5>

- Humas BP Batam. (2019). *Napak Tilas Pembangunan Batam dalam Sejarah Badan Pengusahaan Batam*. BP Batam. <https://bpbatam.go.id/profil/latar-belakang/>
- Kantor Staf President. (2021). *Jadi Proyek Strategis Nasional, Jembatan Batam-Bintan Dukung Pertumbuhan Ekonomi*. Portal Resmi Kantor Staf Presiden.
- Kepri Antara News. (2021). *Progres Proyek KPBU Jembatan Batam - Bintan*. Antara Kepri.
- Kepri Antara News. (2025). *Kepri Jadikan Infrastruktur Sebagai Prioritas Pembangunan Daerah*. Antara Kepri.
- kompasiana. (2023). *Jembatan Batam-Bintan Peningkat Konektivitas di Kepulauan Riau*. Beyond Blogging.
- MARIS, M. (2022). *Ekonomi Politik Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa*. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(1), 133–147. <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.125>
- Newsletter Kantor bersama KPBU. (2022). *Progres Proyek KPBU Jembatan Batam - Bintan*. Kementerian Keuangan.
- Pandu Wiyoga. (2023). *Pembangunan Jembatan Batam-Bintan Diharapkan Memicu Pemerataan Ekonomi*. Kompas Batam.
- Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. (2018). *Kepri Jadikan Infrastruktur Sebagai Prioritas Pembangunan Daerah*. Biro Perekonomian Dan Pembangunan. <https://ekbang.kepriprov.go.id/kepri-jadikan-infrastruktur-sebagai-prioritas-pembangunan-daerah/>
- SIMPULKPBU. (2024). *Detail Project Jembatan Batam-Bintan*. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.